

BAB II

DINAMIKA LEMBAGA PKPU DALAM PRAKTIK POLITIK KESEJAHTERAAN

Deskripsi objek merupakan penggambaran obyek yang menjadi sasaran dalam penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan empat hal utama yang menjadi inti gambaran diantaranya yaitu *pertama* fonemana munculnya lembaga keagamaan Islam pasca orde baru, *kedua* implikasi krisis moneter dan demokratisasi pasca orde baru sebagai setting kemunculan gerakan filantropi (kemanusiaan), *ketiga* kultur ideologi Islam (religi) sebagai identitas partai politik dan masyarakat sipil (Cso), *keempat* Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dan Muatan Politik Filantropi. Pada bagian akhir ini akan menekankan gambaran obyek penelitian yang memuat *dinamika perkembangan sejarah PKPU, Penguatan politik filantropi melalui visi dan misi PKPU Cabang DIY, Program kerja PKPU Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), struktur organisasi PKPU Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kemitraan (Kerjasama) PKPU Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta serta aspek penghambat dan pendukung lembaga PKPU.*

Gambaran umum sejarah profil sangat penting karena menjadi bagian obyek penelitian, bagian ini menjadi dasar seorang peneliti harus mengetahui secara keseluruhan khususnya terkait historis dinamika berdirinya lembaga cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Harapannya dalam pembahasan dapat menganalisis temuan di lapangan secara spesifik dan mendalam aktivitas obyek penelitian. Visi misi akan memberikan gambaran pola dan arah tujuan lembaga dalam menjalani praktik kerja-kerja sosialnya. Program kerja menjadi gambaran khusus realisasi visi misi, menyesuaikan dengan potensi dan masalah yang ada dikelompok sasaran sebagai penerima manfaat. Struktur lembaga menjadi gambaran sistem pembagian

tugas pokok dan fungsi serta sistem garis kordinasi karyawan lembaga dalam membangun kinerja yang profesional.

Sementara kemitraan merupakan bagian bidang yang melakukan ekspansi (perluasan) jaringan eksternal lembaga PKPU dalam mensosialisasikan tawaran program sekaligus sebagai tim *fundrising dan marketing* untuk mencari donatur. Tim kemitraan menjadi kunci utama berjalannya program pembangunan karena membutuhkan anggaran khusus yang sumbernya dari donatur untuk biaya operasionalnya. Aspek pendukung menjadi acuan peluang prestasi kerja PKPU dalam mengisi ruang kosong sementara, aspek penghambat menjadi bahan evaluasi perbaikan dan rekomendasi kinerja lembaga periode berikutnya. Maka untuk mengetahui lebih rinci *background* Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang DIY dapat dipahami beberapa siklus dinamikanya sebagai berikut:

1.1 Fonemana Munculnya Lembaga Keagamaan Islam Pasca Orde Baru

Kondisi sosial yang terjadi di Indonesia pada masa orde baru menunjukkan kompleksitas permasalahan yang sangat dipengaruhi oleh gejolak ekonomi politik. Setelah jatuhnya rezim orde baru era Soeharto 1998 menuju masa reformasi banyak meninggalkan permasalahan sosial yang membutuhkan penanganan khususnya dalam hal pelayanan jaminan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini respon cepat justru dilakukan oleh beberapa organisasi berbasis keislaman. Keterangan seorang antropolog dan ahli Islam Indonesia dari Universitas Boston, AS, Dr.Robert Wiliam Hefner dalam Tebba (1993:249) Islam Orde Baru lebih berkembang daripada Orde Lama yang bisa ditunjukkan adanya pelembagaan zakat, meningkatnya pembangunan masjid dan musholla, serta meluasnya kegiatan organisasi keagamaan Islam seperti NU (Nahdatul Ulama)

yang mendirikan Bank Perkreditan Rakyat. Maka tidak heran lagi kemunculan lembaga filantropi nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) di Indonesia untuk andil mengisi kekosongan dalam pelayanan kesejahteraan yang belum dijamin dan disediakan oleh negara pasca Orde Baru menuju orde reformasi. Gerakan PKPU yang awalnya hanya aksi solidaritas sosial dilakukan di Ambon oleh beberapa kelompok aktivis muda muslim yang saat ini menjadi elit PKS (kader) menjadi titik awal hadirnya lembaga filantropi berbasis masyarakat sipil Islam yang sigap dan tepat dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Perkembangan gerakan pegiat filantropi berbasis masyarakat sipil Islam yang terakomodir, terorganisir dengan baik melahirkan outputnya nyata lahirnya PKPU mampu menjadi sebuah lembaga filantropi besar yang masif dalam distribusi kesejahteraan dan keadilan sosial di era kontemporer. Gerakan PKPU merespon masalah dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan bencana baik skala nasional maupun internasional. Lahirnya gerakan tersebut sudah diiniasi sejak pasca Orde Baru yang hanya sebatas penggalangan dana demi kemaslahatan umat pada akhirnya membawa banyak implikasi sosial, ekonomi, dan politik yang berjalan sampai sekarang. Eksistensi PKPU yang besar juga diduga karena adanya afiliasi dengan Organisasi Partai Politik (OPP) dan Organisasi Sayap Partai (OSP) yaitu Partai Keadilan Sosial (PKS) selaku aktor utama yang melahirkan yayasan PKPU.

1.2 Implikasi Krisis Moneter dan Demokratisasi Pasca Orde Baru Sebagai Setting Kemunculan Gerakan Filantropi (Kemanusiaan)

Sjahrir (1998) dalam bukunya krisis ekonomi menuju reformasi total menjelaskan perjalanan sejarah Indonesia mencatat kondisi ekonomi moneter yang ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (Amerika Serikat) sejak 21 Juli 1997. Hal ini sesungguhnya memberikan dampak luas terhadap kestabilan negara dari beberapa aspek baik politik, sosial, dan budaya. Faktor utama hal ini yaitu adanya krisis ekonomi berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Poppele (1999:14) yang dikutip dalam penelitian Sunderlin, Resosudarmo, Rianto dan Angelsen (2000) menunjukkan adanya perubahan peningkatan jumlah kemiskinan 11% pada tahun 1996 menjadi 14-20% di tahun 1998, kondisi ini disusul dengan peningkatan jumlah pengangguran, melonjaknya inflasi, ketidakstabilan sosial, runtuhnya rezim kekuasaan politik era Soeharto 1998, dan krisis daya beli masyarakat yang mengakibatkan menipisnya bahan pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Gejala manusia akan terlihat anarkis apabila terjadi krisis pangan dan masyarakat tidak bisa mengonsumsi makanan pokok sehari-hari. Menyandang status sosial sebagai pengangguran juga menjadi inti pokok permasalahan masyarakat tidak bisa mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka pemulihan keadaan masa transisi krisis moneter membutuhkan tenaga ekstra dalam segala bidang untuk segera mendapat respon cepat dari pemerintah.

Namun, ternyata kondisi tersebut lamban dilakukan rezim Soeharto dan akhirnya disikapi ekstrem golongan aktivis muda melakukan aksi meng kudeta Soeharto yang menandai berakhirnya Orde Baru. Aksi kudeta menjelaskan

gagalnya suksesi kepemimpinan era Soeharto tahun 1998 dalam pengambilan kebijakan yang terlalu berbelit-belit mengambil sikap dan keputusan politik. Secara tidak langsung kondisi ini telah menciderai nilai-nilai demokrasi pasca Orde Baru karena sejarah masa lalu tentu akan membuat trauma serta berimplikasi menghilangkan kepercayaan dan partisipasi politik masyarakat berkurang dalam mendukung agenda pemerintah untuk pembangunan kesejahteraan nasional. Prinsipnya kesejahteraan dan keadilan merupakan visi Indonesia tercantum dalam konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke empat dan UUD 1945 pasal 34 tentang kesejahteraan sosial, sudah menjadi tugas negara dalam menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukti tersebut disesuaikan melalui visi misi presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang dituangkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) atau selama masa jabatan presiden 5 tahun. Ketika presiden gagal menjalankan program kerjanya sesuai amanah konstitusi maka, juga menegaskan gagalnya negara dalam pelayanan jaminan kesejahteraan dan akan berimplikasi dalam proses demokrasi politik elektoral berikutnya. Kontestasi politik tentu akan mengangkat isu kegagalan kesejahteraan dengan program inovatif sehingga merangkul masyarakat untuk cenderung melirik kandidat dari parpol baru yang dirasa memiliki integritas dan dedikasi program kerja yang tinggi, karena semua itu menjadi hak prerogatif rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem negara demokrasi di Indonesia.

Maka, menghadapi dinamika politik yang semakin panas bentuk upaya untuk menunjang suara dalam pemilu yang dilakukan masing-masing calon kandidat parpol adalah berlomba membuat membuat program populis untuk

masyarakat salah satunya merespon isu kesejahteraan sosial. Isu kesejahteraan dapat menjadi isu paling efektif yang akan melihat dan memetakan kondisi Indonesia masih banyak ketimpangan sosial khususnya antara pulau Jawa (Jawa sentris) dan Indonesia bagian Timur (NTT, Maluku, Papua dll). Dalam kondisi ini isu kesejahteraan berubah menjadi barang politik (*Political goods*) yang dikontestasikan di era kontemporer baik oleh partai politik, lembaga filantropi, *Civil Society* (masyarakat sipil), *Corporate Social Responsibility* (CSR), lembaga pers (media massa) dan beberapa lembaga lainnya. Semua lembaga tersebut mulai menaruh komitmen tinggi dalam membangun kesejahteraan baik dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan penanggulangan bencana (*disaster*). Namun, realitas di lapangan tidak semua lembaga filantropi murni melakukan kerja-kerja kemanusiaan (*humanitarian*) secara berkelanjutan (*sustainable*), dengan asas profetik terkadang mereka hanya membuat agenda insidental yang sering menjalankan program untuk seremonial acara diwaktu tertentu.

Lain halnya menyoroti intensitas partai politik yang memiliki komitmen tinggi dalam merespon isu kemanusiaan yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai Islam masif dalam merespon masalah kemanusiaan di level nasional maupun internasional seperti gempa Lombok 2018, dimuat website PKS dan beberapa media lainnya menyebutkan PKS intensif melakukan penambahan jumlah posko bantuan gempa (<http://pks.id>). Komitmen lainnya dilevel internasional terlihat dari pembentukan *Crisis Center For Rohingnya* (CC4R) berupaya merespon bencana Internasional dengan pembuatan lembaga filantropi internal partai yang bersifat sementara (*ad-hoc*), artinya terbentuknya hanya untuk tujuan tertentu saja dan tidak tetap. Tidak bisa dinafikan lagi eksistensi dan

komitmen PKS sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia yang masif dalam merespon masalah sosial khususnya bencana nasional, di lapangan secara gagah berani membawa atribut partai sebagai identitas lembaga merupakan komitmen tinggi partai PKS. Sejatinya tahun ini merupakan tahun politik dalam membangun citra baik partai kepada publik yang bertujuan untuk perebutan suara konstituen pada pemilu serentak tahun 2019. Oleh karena itu, kegiatan filantropi PKPU memungkinkan digunakan sebagai misi strategis keumatan oleh partai PKS sebagai penganut ideologi Islam (religi). Orientasi yang dibangun PKS sebagai partai Islam bukan saja memenangkan pemilu melainkan menjaga komitmen kemanusiaan yang sudah dibangun sejak awal partai berdiri oleh kalangan aktivis muda mahasiswa muslim. Seorang sosiolog Zuly Qodir (2013) keadaan ini dipengaruhi karena PKS merupakan sebuah partai politik yang semula menjadi bagian dari gerakan tarbiyah di kampus-kampus negeri seperti IPB Bogor, ITB, UNPAD Bandung, UI Jakarta, UNAIR Surabaya, UNBRAW Malang, dan UGM Yogyakarta dalam bentuknya sebagai jamaah masjid menjadi sebuah gerakan politik yang fonemenal dalam beberapa tahun sekurang-kurangnya sejak 2004 sampai 2009. Tidak heran ketika PKS melakukan kaderisasi melalui lembaga dakwah kampus se-Indonesia. Gerakan sayap partai PKS diharapkan akan menjadi bagian kader muda PKS yang dipercaya mampu melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa dimasa depan sekaligus untuk menjawab kegelisahan kaderisasi partai yang tidak bisa menembus dinding kampus dalam melakukan kampanye atau rekrutmen kaderisasi partai.

1.3 Kultur Ideologi Islam Sebagai Identitas Partai Politik dan Masyarakat Sipil

(Cso)

Ideologi parpol merupakan jati diri yang selalu dijadikan pedoman arah gerakan partai. Hal ini diperkuat juga menurut tulisan Nur Mahmudi Ismail yang dimuat dalam karya Sahar L. Hassan (1998:33) menjelaskan landasan filosofis berdirinya Partai Keadilan (PKS) merupakan cerminan dari cara pandang aktivis muslim terhadap Islam dalam satu sisi dan terhadap langkah berjenjang peraih cita-cita dakwah Islam, yang mana pokok pikiran dijadikan landasan kuat memaknai bahwa manusia sebagai khilafah di bumi tidak mungkin mengelakkan sebuah tanggung jawab melaksanakan misi memelihara bumi, mengatur, dan memakmurkan sebagai bagian aktivitas politik yang paling otentik. Dasar filosofis tersebut menguatkan bukti bahwa kekuatan ideologi Islam (religi) dalam tubuh partai politik menjadi identitas khusus untuk bersama meneguhkan kekuatan dalam rangka konsolidasi politik Islam dengan berbagai afiliasi salah satunya yang memiliki orientasi sama perihal kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat melalui kerja-kerja sosial-kemanusiaan.

Gerakan Islam sangat dipercaya PKS membawa misi gerakan dakwah yang bersifat universal. Hal ini diungkapkan kembali oleh Nur Mahmudi Ismail dalam Hassan (1998: 33) universalitas Islam telah menjadi inti pemahaman kaum muslimin terhadap konsep Islam dalam semua dimensinya. Dalam kutipannya juga ditegaskan:

“Islam adalah sistem hidup yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintah dan umat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, kebudayaan dan perundang-undangan, ilmu dan

peradilan, materi dan sumberdaya alam, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan fikrah, akidah yang lurus dan ibadah yang benar”.

Wujud kongkrit bentuk keuniversalan tersebut mencakup beberapa hal baik ranah politik, negara (*state*), dan masyarakat (Ismail dalam Hassan, 1998: 38). Artinya, bisa diinterpretasikan bahwa Islam tidak menutup diri, melainkan memberikan ruang untuk semua orang menggerakkan misi dakwah secara luas khususnya merespon isu masalah keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu solusi alternatif yang dilakukan gerakan dakwah Islam adalah dengan misi persaudaraan antar umat atau berkolaborasi dengan melakukan kedermawanan (*charity*), outputnya berdiri banyak lembaga filantropi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya yang memiliki visi kedermawanan sosial (filantropi) untuk membantu negara dalam pelayanan distribusi kesejahteraan sosial.

Masalah kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan aspek sosial, politik dan ekonomi. Ketiga hal tersebut menjadi satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Salah satu ketimpangan aspek tersebut menyebabkan gangguan sistem secara menyeluruh yang membutuhkan solusi cepat untuk memperbaiki sistem kembali seimbang. Kondisi ini yang membuat aktivis muslim berfikir jalan terbaik untuk menegakkan Islam seluruh dimensi dengan cara mendirikan partai politik (Partai keadilan). Dalam hal ini partai politik dipercaya merupakan sarana dakwah paling efektif demi mewujudkan sebuah struktur masyarakat muslim (Ismail dalam Hassan, 1998:35). Harapannya dengan politik dapat mengaktualisasikan nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan melalui aktivitas gerakan partai. Paradigma inilah yang mengawali aktivis muslim merintis dakwah melalui politik praktis yang selanjutnya muncul kaum ekstrem

radikal yang tidak mempercayai demokrasi di Indonesia. Mereka menginginkan negara Islam atau khilafah yang paling baik dan benar sebagai ideologi negara.

Pentingnya partai politik dalam gerakan dakwah Islam memberikan langkah alternatif dalam politik kaum muslim. Partai politik dipercayai menjadi wadah yang tepat guna menampung seluruh aspirasi masyarakat muslim dalam meneruskan misi dakwah Islam. Penguatan asas keislaman mampu mengakomodir kaum muslimin untuk bersama-sama mendukung eksistensi gerakan partai Islam dalam hal pemberdayaan masyarakat. Seiring perjalanan yang dilalui oleh kalangan aktivis muslim melihat banyak permasalahan yang dihadapi baik dari masalah sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Mereka cenderung cermat dalam memanfaatkan momentum yang ada disekitarnya sebagai kesempatan membangun citra dengan dalih dakwah atau melalui misi strategis dengan mendirikan lembaga sosial dan lembaga pendidikan. Salah satunya hal ini dibuktikan dengan terbentuknya sebuah lembaga sosial kemanusiaan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) yang berdiri lebih awal dibanding Partai Keadilan (PKS saat ini). Tidak menjadi sebuah keraguan setelah PKS berdiri kedua lembaga ini menjalin hubungan kultural yang intensif dalam membantu misi-misi kemanusiaan partai yang bersumber pada dana publik (umat). Fenomena inilah yang disebut dengan adanya politik filantropi. Dan hal ini bermasalah secara hukum, karena partai dan lembaga filantropi merupakan dua lembaga yang berbeda. Lembaga sosial yang mengelola dana publik harus menjadi lembaga yang independen tanpa intervensi dan aliansi politik praktis dalam bentuk apapun. Sementara partai politik yang memiliki sumber anggaran dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) juga tidak boleh melakukan dan

melibatkan lembaga sosial demi kepentingan politik atau dalam artian melakukan KKN dalam tubuh lembaga filantropi dengan memberikan zakat politik partai.

Realitasnya perjalanan sejarah membawa jawaban kecurigaan publik mengenai adanya afiliasi lembaga filantropi PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) dengan PKS ternyata dapat dibenarkan. Sejarah historis berdirinya PK (saat ini PKS) dinahkodai oleh beberapa kalangan aktivis muslim ditengah kran demokrasi yang memberi peluang hadirnya reformasi dari 1998 sampai saat ini. Sementara Nur Mahmudi Ismail dalam Hassan (1998) menjelaskan para intelektual aktivis muslim merasa semakin sempit ruang gerak kebebasan dakwahnya, sehingga pada 1980 mereka mengambil alih masjid sebagai basis operasional gerakannya dan menysar aktivis mahasiswa muslim yang berada dalam lingkungan kampus seperti KAMMI (Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia) serta beberapa Forum Lembaga Dakwah Kampus (FLSDK) untuk memperlancar gerakan PKS. Hal ini diperkuat dalam jurnal CSIS (*Centre For Strategic and International Studies*) yang ditulis oleh M. Djadijono (2008:208-209) menjelaskan PKS memiliki organisasi sayap partai segmen pemuda dan mahasiswa dari pemuda bernama Gema Keadilan sedangkan segmen mahasiswa bernama KAMMI. Artinya jelas hubungan kultural yang dirawat PKPU dengan memberdayakan aktivis pemuda KAMMI secara tidak langsung berfungsi sebagai perantara antara PKPU dan PKS. Hubungan yang dibangun antara PKS dan KAMMI sangat jelas seperti seorang ibu dan anak yang tidak terpisahkan yang saling melindungi keberadaannya.

1.4 Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dan Muatan Politik Filantropi

Aktivitas gerakan PKPU dengan segala bentuk muatan politiknya didukung oleh beberapa aspek seperti latar dinamika perkembangan sejarah PKPU, penguatan politik melalui visi misi lembaga, program kerja, pengurus struktural lembaga, kemitraan dan evaluasi faktor penghambat dan pendukung kinerja lembaga PKPU. Semua hal tersebut yang dapat menjadi profil besar perjalanan PKPU dalam memberikan distribusi kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

1.4.1 Dinamika Perkembangan Sejarah PKPU

Perjalanan sejarah lahirnya gerakan solidaritas sosial diawali dari rasa kepedulian atas tragedi kemanusiaan pada tahun 1997 sampai 1999 dengan kondisi krisis moneter yang memicu banyak masalah seperti aspek sosial, ekonomi, politik, moral, religi, dan pendidikan. Sumber masalah yang urgen untuk segera mendapat penanganan khususnya perihal kemiskinan dan krisis pangan. Kondisi kemiskinan berkaitan dengan faktor ekonomi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya untuk konsumsi makanan sehari-hari. Keadaan ini mendorong kesadaran dan mengerakkan hati sekelompok aktivis pemuda yaitu *Raden Bagus Suryama Majana Sastra* (kader PKS), *Sahabudin, Agung Notowiguno, dan Dedi Sularso* melakukan aksi sosial keseluruhan nusantara untuk memberikan harapan kehidupan. Selanjutnya menindaklanjuti rencana yang dijadikan output penanda kesadaran akan kemanusiaan (filantropi) di Indonesia bertujuan membuat kehidupan sejahtera untuk masyarakat maka dibentuklah entitas komunitas peduli umat dan saat ini menjadi lembaga filantropi (*humanitarian*) yang dapat

bergerak sistematis, terorganisir dan berkelanjutan (*sustainable*) bernama yayasan PKPU.

Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) merupakan salah satu lembaga sosial kemanusiaan terbesar yang lahir atas inisiatif aktivis muslim dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 10 November 1999. Kemudian pada 8 Oktober 2001 memperlihatkan progresifitas kinerja yang baik maka ditetapkan pemerintah menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) berdasarkan Surat Keterangan (SK) Menteri Agama Nomor 441. Selain itu PKPU sebagai lembaga kemanusiaan yang kinerjanya patut diberikan apresiasi karena semakin meluasnya jangkauan aktivitas sosial yang disalurkan ke berbagai lapisan masyarakat diseluruh nusantara dan beberapa negara di luar negeri, serta adanya dorongan masyarakat luas dalam berkolaborasi memberdayakan masyarakat pra sejahtera. Maka kiprah kinerja PKPU sebagai lembaga filantropi terlihat jelas dapat berdampingan dengan NGO Internasional dari berbagai negara (Mahmudya, 2017). Praktik kerja yang dijalankan PKPU seperti tanggap darurat sampai fase pembangunan kembali pada dasarnya secara finansial membutuhkan anggaran dana besar berhasil dilakukan hingga masyarakat mandiri. Adapun beberapa wilayah yang pernah ditangani oleh PKPU yaitu Gempa Bumi dan Tsunami Aceh (2004), Yogyakarta (2006), Lombok (2018) dan Palu (2018), Jakarta serta beberapa daerah lainnya baik regional, nasional maupun internasional. Kiprah PKPU dalam kancah Internasional semakin membuat publik percaya atas kecepatan, ketepatan, akuntabilitas kinerja lembaga, dan hal ini sangat

mempengaruhi kepercayaan publik khususnya donatur untuk bermitra. Menurut Mahmudya (2017) dalam hasil penelitiannya ditegaskan sebagai lembaga yang berkomitmen menangani isu sosial global, maka standarisasi sistem kerja serta pengembangan menuntut PKPU terus mengedepankan dan memprioritaskan mutu program dan layanan yang menghasilkan kontribusi solutif bagi masyarakat. Dibuktikan oleh PKPU pada 22 Juli 2008, lembaga kemanusiaan ini menunjukkan prestasi kembali yaitu terdaftar di PBB sebagai *Non Government Organization (NGO)* dengan *Spacial Consultative Status With the Economic Social Concil* merupakan sebuah lembaga swasta yang ahli dalam menangani masalah ekonomi dan sosial. Selain itu, PKPU pada 29 Januari 2010 terdaftar resmi sebagai organisasi sosial nasional berdasarkan keputusan Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia nomor 08/Huk/2010 serta, terdaftar pula di UNI Eropa dengan nomor registrasi Europe Aid ID nomor “2010- CSD-1203198618”.

Dalam perjalannya PKPU pernah mengalami masa *spin off* (pemisahan) tahun 2015 sesuai SK Menteri Agama RI No. 423. Dalam penjelasannya lembaga PKPU tidak mengurus dana zakat lagi, melainkan fokus menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) kemanusiaan yang juga ditandai dengan merubah nama menjadi PKPU *Human Initiative (HI)*. Artinya saat ini secara kelembagaan sudah berbeda antara PKPU HI dan lembaga zakat. Lembaga zakat yang baru terbentuk diserahkan kepada IZI (Inisiatif Zakat Indonesia). IZI secara resmi mulai beroperasi pada 1 Januari 2016 dengan fokus mengelola

dana zakat yang sebelumnya telah dikelola oleh PKPU selama kurang lebih 16 tahun. Selanjutnya kehadiran IZI diharapkan tetap meneruskan visi dan misi lembaga PKPU sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Maka dari perbedaan lembaga tersebut saat ini PKPU tidak menggunakan dana zakat, melainkan menggunakan sumber dana utama dari CSR (*Corporate Social Responsibility*), infaq, shadaqoh, serta donatur baik ritel (individu) dan lembaga (perusahaan).

Kemudian sejarah mencatat perjalanan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) sampai pada tataran regional Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2001 ditandai dengan bencana tanah longsor di Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Pada saat itu pemerintah memberi apresiasi dengan dikukuhkan menjadi LAZDA (Lembaga Amil Zakat Daerah). Awal aktivitas tersebut secara tidak langsung justru memberikan ruang ekspansi hadirnya cabang PKPU DIY. Sisi yang bisa membedakan PKPU dengan lembaga filantropi yang lainnya yaitu PKPU merupakan satu-satunya lembaga filantropi nasional yang lahir dari campur tangan aktivitas partai politik (PKS). Artinya PKPU merupakan anak dari PKS yang dipisahkan secara kelembagaan. PKPU masih intensif menjaring dan melibatkan pelajar dan mahasiswa dalam sistem kemitraan untuk kegiatan *fundraising* seperti organisasi dakwah kampus. Bisa dikatakan relasi ini merupakan strategi lama PKS yang harus tetap terjaga untuk melakukan kaderisasi aktivis mahasiswa muslim. Hubungan antara PKPU dan KAMMI sebagai sayap partai juga dapat digambarkan dalam istilah simbiosis mutualisme dimana PKPU

diuntungkan melalui ekspansi jaringan organisasi sayap partai baik KAMMI, LDK, dan HMJ yang melakukan aktivitas penggalangan dana untuk diserahkan ke PKPU dengan sistem perjanjian (Mou), sementara organisasi sayap parpol tersebut diuntungkan karena *event* atau kegiatan organisasi akan mendapat *support* dana khusus dari PKPU sekaligus dapat menjaring kader-kader muslim yang memiliki jiwa *leadership*.

Maka, perlu peninjauan khusus dan evaluasi lembaga filantropi untuk benar-benar menjadi lembaga independen tanpa muatan politik praktis di dalamnya. Sebagai upaya untuk mengantisipasi politisasi kesejahteraan yang berada dalam tubuh lembaga filantropi nasional. Sudah seharusnya pemerintah bisa menyikapi hal tersebut dalam proses produk kebijakan publik yang lebih humanis dan emansipatif. Khususnya menjelang tahun politik dengan banyaknya isu bencana nasional saat ini, filantropi insidental pun menjadi euforia dan bermakna positif dimata publik. Namun, terkadang orang awam belum mengetahui unsur lain dibalik aktivitas sosial yang positif berorientasi untuk kepentingan politik praktis. Perlunya sosialisasi dan pendidikan politik untuk mengantisipasi politik uang dalam makna gerakan filantropi juga menjadi hal utama yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pesta demokrasi (pemilu), salah satunya untuk menghilangkan politisasi lembaga filantropi sebagai kelompok masyarakat sipil yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat.



Sumber: Kantor Cabang PKPU Daerah Istimewa Yogyakarta (2018)

1.4.2 Penguatan Politik Filantropi melalui Visi dan Misi PKPU Cabang DIY

Sebagai lembaga kemanusiaan kelas nasional dan internasional PKPU mempunyai visi yaitu dapat menjadi lembaga tingkat dunia yang terpercaya dalam membangun kemandirian. Sementara misi programnya menyoal program yang populis untuk kesejahteraan masyarakat yaitu meliputi beberapa hal:

1. Dapat memberikan program pendayagunaan program gawat darurat, *recovery*, pemberdayaan dalam meningkatkan kualitas hidup dan membangun kemandirian.
2. Dapat menjalin kemitraan (*relations*) dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis dan organisasi masyarakat sipil (*Civil Society Organization*) lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut lembaga.
3. Dapat melakukan aktivitas studi, penelitian (*reseach*), pengembangan, dan pembangunan kapasitas yang relevan bagi peningkatan efektivitas peran Organisasi Masyarakat Sipil (Cso).

4. Mampu berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum kerjasama dan program sosial kemanusiaan penting lainnya di level regional, nasional dan internasional.

Misi tersebut menjadi dasar utama dalam menjalankan agenda program kerja. Agenda PKPU pada prinsipnya dikemas dengan manajemen yang baik dengan cara terprogram, terencana, sistematis, dan teruji sesuai dengan agenda SDGs (*sustainable development goals*). Hal inilah yang secara tidak langsung dapat membedakan program kerja antara masyarakat sipil (*Civil Society*) dengan pemerintah (*state*), perbedaan di lapangan sangat jelas adanya, pemerintah mampu membangun dalam hal pemberdayaan dan pengadaan alat sekalipun, namun pemerintah tidak mampu memberikan advokasi setelah *pilot project* tersebut dijalankan dan akhirnya hal ini membuat sistem tidak berjalan, karena langsung ditinggal tanpa membuat sistem atau kader pengurus mandiri untuk melanjutkan di lokasi obyek sasaran.

Sementara, berbeda lembaga filantropi berbasis masyarakat sipil khususnya PKPU mampu memberikan advokasi secara berkelanjutan dalam menjaga sistem tetap bekerja sesuai dengan komitmen bersama yang dibuat oleh pihak PKPU melalui sistem kaderisasi yang berasal dari *stakeholder* masyarakat. Pada faktanya memang kerja kolaboratif PKPU memberikan banyak manfaat nyata yang langsung dirasakan masyarakat. Kerja PKPU dapat memberikan jaminan program berkelanjutan untuk masyarakat, meskipun dalam distribusi kesejahteraan ini rentan ditunggangi oleh kepentingan politik praktis. Berangkat dari asas yang sama maka

kepentingan politik Islam (keumatan) menjadi ciri khusus PKS dan PKPU dalam menjalankan misinya untuk bermitra. Meskipun prinsip utama PKS menjadi partai yang tidak akan bekerja hanya untuk ikut serta dalam pemilu dan tidak bubar hanya lantaran kalah dalam jumlah perolehan kursi (Ismail dalam Hasan, 1998: 37). Namun, penekanan eksistensi dan dominasi gerakan dakwah lembaga itulah yang harus selalu berjalan seimbang disemua dimensi kehidupan masyarakat itulah yang bisa dikatakan PKS sudah tidak ideologis melainkan bertransformasi menjadi parpol pragmatis dan oportunis (Qodir: 2013:136). Dia juga menambahkan kondisi ini dipengaruhi sejarah masa lalu yang tampaknya PKS telah belajar banyak dari gerakan-gerakan Islam radikal di Timur Tengah dan Indonesia zaman NII (Negara Islam Indonesia) sehingga sekarang PKS sebagai partai selalu berusaha agar cita-citanya tercapai, dengan cara apapun dalam berpolitik.

1.4.3 Program Kerja PKPU Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Adapun beberapa program kerja PKPU mulai dari pusat sampai pada tingkat cabang fokus pada hal pendidikan, ekonomi, kesehatan dan tanggap darurat (*disaster*). Maka dari program pembangunan jangka panjang yang menjadi agenda PKPU pusat lahirlah beberapa program sinergis sejak 1999 sampai saat ini yaitu program:

1. *Initiative For Children,*
2. *Initiative For Disaster,*
3. *Initiative For Empowerment dan*
4. *Sebar Qurban Nusantara.*

Initiative For Children program bahagia bersama yatim atau kaum dhuafa. *Initiative For Disaster* merupakan program mitigasi bencana dan pemberdayaan masyarakat sadar bencana. *Initiative For Empowerment* kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan berkelanjutan melalui pemuda berdaya, kampung berdaya, dan keluarga berdaya. Selanjutnya pada *Sebar Qurban Nusantara* merupakan penyaluran pangan berupa daging qurban pada wilayah Indonesia pinggiran dan negaramuslim lain yang berada dalam pengungsian (<http://pkpu.org>).

Fokus program PKPU Cabang disesuaikan dengan kondisi geografis dan potensi wilayah. Program pembangunan tersebut dijalankan PKPU Cabang Daerah Istimewa berdasarkan analisis *social mapping* dan *assignment* tim pendayagunaan yang fokus pada program lapangan. Konsep kerja di PKPU Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi beberapa tim yaitu tim operasional, tim kemitraan dan tim pendayagunaan. Tim operasional fokus pada sumberdaya manusia, administrasi dan keuangan, sedangkan tim kemitraan fokus pada hubungan eksternal PKPU khususnya dalam mencari donatur dan kemitraan lembaga. Sementara tim pendayagunaan fokus menyalurkan alokasi dana dari donatur dalam bentuk program kerja tahunan yang menyesuaikan masalah dan potensi wilayah obyek sasaran. Selain itu juga tim pendayagunaan dibantu oleh tim fasilitator selalu berhubungan dengan masyarakat dalam program pemberdayaan.

Maka, berdasarkan pembagian bidang tersebut, PKPU Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki realisasi beberapa program cabang

yang disesuaikan dengan hasil *social mapping* tim pendayagunaan diantaranya mencakup wilayah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Program di Kabupaten Gunungkidul (GK)

- a. Program berbagi pembangunan air
- b. Program kesehatan seribu jamban
- c. Program ekonomi peternakan melalui pembibitan Kambing
- d. Program kader berdaya melalui kelompok tani.

2. Program di Kabupaten Kulon Progo (KP)

- a. Program Ekonomi Peternakan
- b. Program pembangunan air (Sentolo)
- c. Program makanan olahan
- d. Program *charity* dan layanan kesehatan daerah minus

3. Program di Kabupaten Bantul

- a. Program Kerajinan eceng gondok
- b. Program ekonomi kerajinan
- c. Program pembangunan air bersih
- d. Program beasiswa yatim menghafal

4. Program di Kabupaten Sleman

- a. Program Kampung Tangguh
- b. Beasiswa akselerasi pintar
- c. Program makanan olahan
- d. Program LKM (Lembaga Keuangan Mikro)

5. Program di Kota Yogyakarta

Khusus Kota Yogyakarta program ini dikemas dalam satu wadah terpadu yaitu sebelumnya bernama rumah Srikandi saat ini menjadi Bunda Mengajar, karena pegiatnya mayoritas perempuan. Program Rumah Srikandi pernah menjadi salah satu program nasional dengan bentuk kader berdaya. Adapun beberapa programnya yaitu:

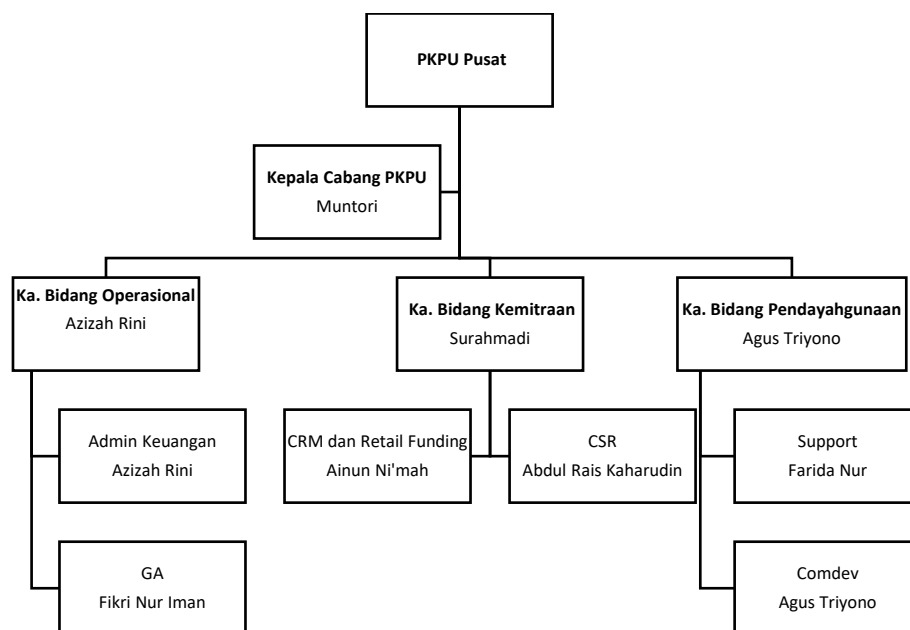
- a. Program kesehatan Gizi
- b. Program Pendidikan
- c. Program *Urban Farming*
- d. Program pelatihan dan kursus
- e. Program study banding dan *outbond*



Sumber: Hasil observasi Desa Binaan PKPU di Kab.Gunung Kidul (2/11/2018)

1.4.4 Struktur Organisasi PKPU Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Untuk menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan PKPU membutuhkan tugas proporsional secara hierarkis. Maka struktur organisasi Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dinahkodai oleh seorang *manager* atau kepala cabang dan juga dibantu oleh beberapa bidang lain diantaranya bidang operasional, bidang kemitraan, dan bidang pendayagunaan. Untuk memberikan gambaran struktur organisasi berikut ini akan dijelaskan struktural dan tugas pokok kepengurusan PKPU cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Struktur dijadikan acuan hirarkis sistem lembaga, sedangkan tugas pokok menjadi gambaran pembagian tugas secara proporsional sehingga dapat menjamin kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia yang bekerja profesional dan berintegritas sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan.



Sumber: diolah dari wawancara pengurus PKPU Cabang DIY (Agus Triyono, 2018)

Adapun tugas dan fungsi keseharian yang dilakukan oleh pengurus PKPU sebagai berikut:

1. Kepala Cabang

Dalam hal ini kepala cabang mempunyai tugas utama yaitu memimpin dan mengelola program kerja lembaga dalam menjalankan aktivitas kerja. Selain itu bertanggung jawab penuh atas nama baik kantor cabang dengan citra yang positif, mengupayakan peningkatan kesejahteraan untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya. Kepala Cabang memegang tanggung jawab terhadap perusahaan, dimana sebagai pelaksana operasional penuh harus sesuai dengan sistem dan regulasi, selain itu merealisasikan profit sesuai dengan yang ditargetkan masing-masing lembaga cabang.

2. Bidang Operasional

Dalam bidang ini hal yang dipersiapkan meliputi terkait administrasi, pengelolaan keuangan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) karyawan atau pengurus PKPU Cabang DIY. Selain itu operasional adalah bidang yang menangani perihal semua teknis kelembagaan. Semua hal yang dibutuhkan dalam keberlangsungan lembaga maka bidang inilah yang mempersiapkan operasionalnya. Bidang ini merupakan bidang teknis kelembagaan.

3. Bidang Kemitraan

Dalam bidang ini mengurus dan mencari donatur dana, baik dari *Corporate Social Responsibility (CSR)*, donatur lembaga, donatur ritel, selain itu juga infaq, dan shodaqoh. Bidang ini yang menjalankan relasi atau hubungan PKPU dengan pihak luar sebagai mitra kerja dalam mendukung program kerja PKPU Cabang

DIY. Bidang kemitraan sangat menentukan arah kerja kolaboratif lembaga, pada prinsipnya bidang kemitraan merupakan kunci utama sinergi lembaga.

4. Bidang Pendayagunaan

Dalam bidang ini pegiat PKPU bertugas sebagai penyalur dana bantuan yang bersumber dari donatur untuk masyarakat yang membutuhkan melalui program kerja tahunan atau sesuai permintaan donatur. Bidang pendayagunaan merupakan tim lapangan yang berhak menentukan relasi pemberdayaan ataupun wilayah sasaran harus didasarkan oleh hasil *social mapping* ataupun penelitian tim lapangan. Selanjutnya dari hasil tersebut diperoleh data wilayah sasaran yang menjadi *pilot project* lembaga. Bidang pendayagunaan merupakan tim kerja lapangan yang selalu melakukan interaksi dengan masyarakat secara langsung khususnya dalam persiapan teknis pemberdayaan.

1.4.5 Kemitraan (Kerjasama) PKPU Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagai upaya dalam mengoptimalkan program kerja PKPU berusaha menjalin hubungan kerja kolaboratif dengan beberapa komunitas masyarakat, organisasi kemahasiswaan/kepemudaan, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, media masa (pers), lembaga pendidikan dan beberapa lembaga filantropi lainnya untuk menjadi donatur kemanusiaan. Adapun beberapa donatur berasal dari kemitraan lokal/nasional dan Internasional sebagai berikut:

1. Kemitraan Nasional

- a. CSR Sarihusada Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. CSR PT. ASITA Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. PT. Telekomunikasi Jogja

- d. Dewan Masjid Indonesia (DMI)
- e. Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK)
- f. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
- g. Komunitas Orang Borobudur (OBOR)
- h. Komunitas Sepeda, komunitas mobil
- i. Komunitas biola
- j. Lembaga Pendidikan negeri
- k. Lembaga Pendidikan swasta/yayasan (Budi Mulya, Mts, Sekolah IT, dll)
- l. Lembaga perguruan tinggi (UPN, UGM, dll)
- m. Lembaga Pers/media (Humas Pusat, suara gama, suara karya, republika online).
- n. Bappeda se- Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai wilayah sasaran
- o. Dinas Pendidikan se- Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai wilayah sasaran
- p. Dinas Sosial se- Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai wilayah sasaran.

2. Kemitraan Internasional

Dalam hal ini kemitraan Internasional sebagai lembaga donor internasional yaitu:

- a. Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
- b. United Arab Emirates (Bantuan Luar Negeri Arab)
- c. Amerika Utara, Amerika Serikat, Jerman, Jepang dan Belanda.

2.4.6 Aspek Penghambat dan Pendukung Kinerja Lembaga PKPU

Dinamika perjalanan PKPU tidak selalu mulus melainkan banyak kendala yang selalu dihadapi seperti:

1. Pendanaan merupakan biaya operasional untuk melaksanakan program kerja PKPU baik agenda tahunan maupun agenda insidental tanggap bencana. Semua itu membutuhkan anggaran untuk bisa mencukupi pelaksanaan agenda program. Keterbatasan PKPU terlihat jelas berbeda dengan beberapa *foundation* (yayasan) lainnya yang memiliki bisnis sehingga pembiayaan lembaga akan dapat dibiayai dari hasil usaha. Kontek pendanaan tidak menjadi pokok persoalan program ketika diiringi dengan bisnis menyokong keberlanjutan program.
2. Sumber Daya Manusia merupakan aktor penting yang menggerakkan roda organisasi. Permasalahannya terkadang beberapa bulan bekerja mengundurkan diri meskipun secara kelembagaan sudah berupaya meningkatkan kapasitas *skill* seperti pelatihan, outbond, dan lainnya.
3. Birokrasi merupakan hubungan antar kelembagaan yaitu PKPU dengan pemerintah. Dalam hal ini menjadi kendala khususnya dalam proses perizinan yang terlalu lama. Khususnya pemerintah menerapkan undang-undang dan barang tahun 1961 maka harus ada penyesuaian khusus untuk bisa mencermati ketentuan yang berlaku dalam proses perizinan.
4. Partisipasi masyarakat merupakan respon dan dukungan masyarakat yang masih kurang. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dengan perbedaan beberapa kultur budaya. Maka membutuhkan metode khusus untuk membuat hubungan baik dan kepercayaan timbul di masyarakat sehingga terlibat aktif dalam mendukung program. Sementara aspek pendukung ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan secara baik oleh PKPU diantaranya:

- a. Tercatat di bawah PBB yang diakui secara jelas di level internasional merupakan sebuah branding khusus lembaga seharusnya bisa melakukan beberapa marketing dan dapat menjalin kemitraan dengan beberapa donatur, CSR dan beberapa pihak lainnya baik regional, nasional, maupun internasional.
- b. Mengakui sebagai lembaga kesejahteraan sosial secara transparan artinya menunjukkan kredibilitas lembaga yang fokus pada masalah sosial-kemanusiaan dan tidak lagi mengurus dana zakat.
- c. Berbasis yayasan Islam, merupakan kekuatan khusus dalam menguatkan solidaritas umat. Selain itu banyak lembaga berbasis Islam yang dapat di jadikan mitra kerja dalam merespon isu internasional Myanmar, Palestina, Rohingnya, dll. Seperti Masjid, Sekolah Islam.

2.5 Politik Kesejahteraan PKPU Sebagai Bentuk *Soft Politics*

Kehadiran PKPU sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau lembaga filantropi pasca Orde Baru menuju reformasi menjadi sebuah lembaga yang memang sangat dibutuhkan masyarakat khususnya untuk korban (penyintas) maupun masyarakat umum yang ingin menitipkan donasinya baik barang maupun uang. Munculnya PKPU menunjukkan progresifitas yang baik dimana awal berdirinya hanya sebuah yayasan PKPU (1999) saat ini menjadi lembaga filantropi nasional berstandar internasional. Gerakan yang dilakukan PKPU sebagai lembaga filantropi berbasis masyarakat sipil memiliki kinerja cepat dan tepat sasaran dalam mengisi kekosongan yang belum disediakan oleh negara, mereka cenderung mengisi dalam berbagai dimensi baik aspek sosial, ekonomi,

pendidikan, maupun tanggap bencana. Dalam hal ini, melihat sisi historis PKPU yang dilahirkan oleh inisiator kader (elit) PKS, maka secara tidak langsung ada makna politik kultural yang terkandung dalam proses pelayanan filantropi ataupun distribusi kesejahteraan. Peranan PKPU sebagai organisasi sektor ketiga (*intermediary actor*) selalu berupaya eksis dalam memberikan pelayanan kesejahteraan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi politik *intermediary* dalam menghadapi kontestasi kesejahteraan dengan negara sebagai penanggungjawab utama.

Fenomena kesejahteraan seperti kesenjangan sosial dan kemiskinan menjadi suatu isu populis yang sangat seksi terlebih menjelang proses elektoral (pemilu), karena hal ini bisa menjadi sebuah modal sosial yang sangat fundamental dalam sebuah negara demokrasi. Modal sosial merupakan kemampuan dalam mengurangi penderitaan seseorang atau kelompok dengan metode solidaritas sosial baik sukarelawan (*voluntary*), tolong menolong, dan berjejaring. Modal sosial yang masif dilakukan akan mendukung proses demokrasi sosial yang akan mendukung masyarakat dalam aksi pemberdayaan seperti halnya yang dilakukan PKPU dengan program pemberdayaan di desa binaan. Selain itu, demokrasi sosial dari konsep negara yaitu menginginkan adanya legislasi dan institusionalisasi akhirnya juga dilakukan PKPU yang awalnya hanya sebuah yayasan saat ini sudah legal menjadi lembaga kesejahteraan sosial di bawah SK Kemensos RI. Semua diraih PKPU karena aktivitas filantropi yang dilakukan sangat konsisten, terorganisir dan berkelanjutan sehingga perlahan dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial untuk masyarakat.

Salah satu senjata jitu yang dimainkan PKPU membawa misi dakwah sehingga gerakannya aman dalam dinamika politik yang ada. Gerakan PKPU berada di tengah dengan menjaga ideologi Islam meskipun kearah pragmatis. Mereka bergerak dengan kekuatan solidaritas yang melibatkan beberapa volunteer dari beberapa kalangan salah satunya dengan bantuan lembaga dakwah kampus yang berada di lapangan, sehingga semakin membuktikan bahwa gerakan sayap partai PKS dapat membuat lingkaran persaudaraan antara PKPU, LDK (KAMMI), dan forum-forum berbasis Islam lainnya mitra PKPU dengan misi konsolidasi politik elektoral. Sinergitas kekuatan *soft politic* yang dijalankan oleh beberapa lembaga tersebut menjalankan misi senyap demi mendukung suksesnya PKS dalam proses demokrasi. PKPU sebagai lembaga filantropi memiliki ruang gerak yang luas dalam arena sosial, lembaga filantropi dapat masuk kesemua sektor. Maka, PKS dengan kekuatan motto berkhidmat untuk bangsa dan negara artinya PKS menggunakan cara filantropis untuk menembus beberapa ruang sosial masyarakat.